

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Lahirnya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.33 tahun 2004 membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah

Dalam upaya memacu pembangunan daerah, membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang cukup besar yang tercermin pada pos belanja yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Semakin meningkatnya belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Provinsi Lampung dalam menyikapi pradigma baru sistem pemerintahan saat ini telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemekaran wilayah yang semula hanya 4 kabupaten/kota menjadi 14 kabupaten/kota, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kabupaten yang merupakan wilayah pemekaran adalah kabupaten Lampung Tengah, dengan ibu kotanya Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah pada awalnya memiliki wilayah yang cukup luas, dengan pusat pemerintahan di Metro. Namun sejak tahun 2001 kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu kabupaten Lampung Tengah sendiri dengan ibu kota Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Timur dengan ibu kota Sukadana, dan Kota Metro dengan ibu kota Metro. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan sekaligus memperpendek rentangkendali pengawasan pemerintahan.

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mendorong pembangunan di daerahnya, melalui kebijakan anggaran telah memperbesar pengeluaran untuk belanja daerah baik belanja pembangunan maupun belanja rutin (pegawai). Diharapkan dengan meningkatnya belanja daerah, kegiatan perekonomian dan pembangunan akan terus meningkat. Meningkatnya pembangunan ekonomi ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama periode 5 tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1, terlihat bahwa belanja daerah kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2009 besarnya belanja daerah kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 775.566.234 juta rupiah meningkat menjadi 1.455.637.136 juta rupiah pada tahun 2013, atau mengalami kenaikan rata-rata 17,81 persen per tahun. Dari besaran realisasi belanja daerah tersebut diharapkan pembangunan di kabupaten Lampung Tengah sudah semakin berkembang dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Tabel 1. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 – 2013

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah (Dalam Juta Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2009	775.566,234	-
2010	824.290,133	6,28
2011	900.277,306	9,21
2012	1.273.550,477	41,46
2013	1.455.637,136	14,29
Rata-rata		17,81

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2000 - 2013

Dalam merealisasikan pengeluaran (belanja) daerah, pemerintah daerah sangat tergantung pada besaran pendapatan (penerimaan) daerah yang diperoleh selama periode tertentu. Secara umum penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan lain-lain pendapatan yang syah. Dana perimbangan biasanya diberikan pemerintah pusat dalam upaya mengatasi ketimpangan fiskal guna membiaya pembangunan di daerah. Salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah pada sebagian besar daerah di Indonesia (termasuk Lampung Tengah) masih relatif tinggi (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang

dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Gambaran tentang perkembangan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada data berikut.

Tabel 2. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 – 2013

<b>Tahun</b>	<b>DAU (dalam Juta Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2009	699.102,531	-
2010	669.111,784	-4,28
2011	706.867,550	5,7
2012	784.773,652	11,02
2013	954.226,843	21,59
	Rata-rata	8,49

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2009 – 2013

Dari Tabel 2 di atas terlihat DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 besarnya DAU yang diterima kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 699.102.531 juta rupiah, dan pada tahun 2013 telah meningkat menjadi 954.226.843 juta rupiah, atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,49 persen per tahun. Diharapkan dengan adanya DAU akan mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain DAU, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada suatu daerah perlu upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah. PAD Kabupaten Lampung Tengah terlihat masih relatif rendah kontribusinya terhadap total penerimaan daerah. Meskipun demikian jika dilihat dari perkembangannya terlihat

sudah relatif cukup tinggi, yaitu rata-rata mengalami peningkatan 60,68 persen per tahun selama periode lima tahun terakhir. Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan PAD kabupaten Lampung Tengah cukup baik. Pada tahun 2009 total PAD kabupaten Lampung Tengah mencapai 16.523.133 juta rupiah telah meningkat menjadi 101.060.354 juta rupiah pada tahun 2013, atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 60,68 persen per tahun. Kenaikan ini cukup baik dan diharapkan akan mampu membantu pembiayaan bagi pembangunan daerah.

Tabel 3. Perkembangan PAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 – 2013

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Dalam Juta Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2009	16.523,133	-
2010	20.289,640	22,79
2011	37.086,491	82,78
2012	49.840,384	34,38
2013	101.060,354	102,76
	Rata-rata	60,68

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2009 – 2013

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah di kabupaten Lampung Tengah sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti DAU, PAD kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan antara 8 sampai dengan 61 persen per tahun. Namun demikian jika dikaitkan dengan kenaikan belanja daerah yang meningkat rata-rata hanya sebesar 17,81 persen per tahun, terlihat masih belum proporsional. Di satu pihak kenaikan sumber pendapatan daerah terutama PAD sudah cukup tinggi dan juga dana perimbangan terutama DAU juga cukup besar, namun kenaikan belanja daerah masih relative rendah. Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh dana perimbangan terutama DAU dan penerimaan daerah dalam hal ini PAD terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

## **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah**

Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Peran PAD cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

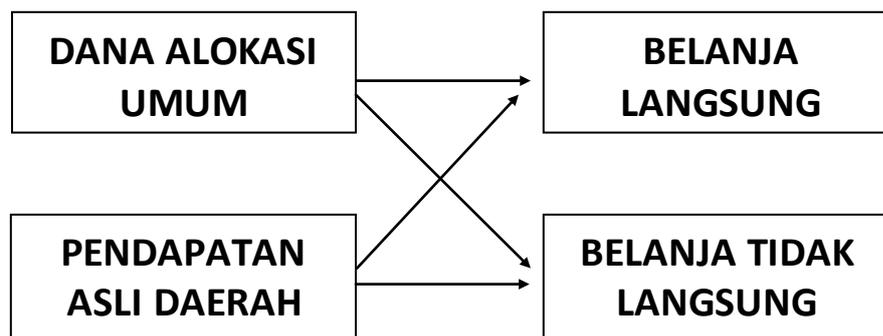
Selain itu Pendapatan Asli Daerah juga sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lainnya.

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan

disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari,2009).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja tidak langsung dapat dilihat dari alokasi pembiayaan untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, dan lainnya. Adanya kewajiban untuk mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung menyebabkan DAU memiliki pengaruh terhadap belanja tidak langsung. Dari Uraian di atas dapat digambarkan secara skema alur kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Alokasi Belanja Daerah

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung.
2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung.
3. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung.
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung.